

ABSTRAK

Dana desa merupakan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah tiap tahunnya ke tiap desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun dalam perjalanannya ada berbagai permasalahan yang timbul seperti ketidaktahuan aparatur desa mengelola dana tersebut, dana desa yang belum mencapai aspek pemberdayaan, dan penggunaan dana desa ini lebih banyak terfokus kepada bidang pembangunan fisik tanpa adanya pemberdayaan untuk masyarakat yang bisa membantu ekonomi desa dan membuat lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan untuk menunjukkan alokasi dana desa tersebut digunakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori implementasi dari Edwards III (1980) yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarsari secara umum cukup berjalan baik, namun belum maksimal dan masih terdapat kendala, dari komunikasi seperti sosialisasi yang belum berjalan dengan efektif, website desa yang masih minim informasi, intensitas sosialisasi yang kurang, dari sumber daya seperti tidak adanya fasilitas tempat penunjang kegiatan pemberdayaan, belum adanya pendapatan asli desa guna menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat, dari disposisi seperti penggunaan masih terfokus dibidang pembangunan fisik, masih ada aspirasi dari masyarakat yang ingin pemberdayaan masyarakat yang belum dilaksanakan, dan dari struktur birokrasi dalam pelaporan penggunaan dana desa sering ditemui kesalahan seperti ketidaksesuaian anggaran dana dengan pelaksanaan dan kesalahan perhitungan, namun untuk pembagian tugas dan wewenang sudah berjalan baik.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Alokasi Dana Desa, Kebijakan, Implementasi

ABSTRACT

Village funds are the budget allocated by the government every year to each villages that used for village development activities and village community/society empowerment. but on the implementation, there are various problems arise such as ignorance of managing the funds, village funds that have not yet reached the aspect of empowerment. Another problem is the use of village funds is more focused on the field of physical development without empowerment for the community that can help the village's economy and create new jobs for the village community. The aims of this research is to find out the implementation of the village fund allocation policy for community empowerment in Banjarsari Village, Pangalengan District, Bandung Regency and to show the village fund allocation used in the field of community empowerment.

This study was conducted in Banjarsari Village, Pangalengan District, Bandung Regency. The theory used in the study was Edwards III's (1980) implementation theory which consists of the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method of this study was qualitative research with a descriptive approach. The data were collected by interview, observation and documentary study. The data analysis used was an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that the implementation of the village fund allocation policy for community empowerment in Banjarsari Village was generally quite good, but it was not maximal and there were still obstacles, such as socialization that had not been carried out effectively, village website that still lacks information, less intensity of socialization, the use of village fund was still focused in the field of physical development, no facilities to support empowerment activities, from resources such as the absence of facilities to support empowerment activities, no original income of village to support community empowerment activities, from dispositions such as usage still focused on the field of physical development, there are still aspirations from the community who want community empowerment that has not been implemented, and from the bureaucratic structure errors were often occurs in the report from the use of village funds such as budget mismatch with implementation and miscalculation. but from the bureaucratic structure the division of tasks and authorities has gone well.

Keyword: Community Empowerment, Village Fund Allocation, Policy, Implementation